



PEMBERONTAKAN PRRI SUMATRA SELATAN TANPA DEWAN GARUDA

Diki Tri Apriansyah Putra^a, Farida R. Wargadalem^{b*}

farida_wd@fkip.unsri.ac.id

^aMahasiswa S2 Ilmu Sejarah FIB Universitas Sriwijaya, Indonesia.

^bFKIP Universitas Sriwijaya, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 26th November 2020

Revised: 30th December 2020

Accepted: 30th December 2020

Published: 31th December 2020

Permalink/DOI

10.17977/um020v14i220p32

Copyright © 2020, *Sejarah dan Budaya*. All right reserved

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

ABSTRACT

PRRI South Sumatra is part of the central PRRI. Initially, Barlian (Garuda Council) along with other leaders in Sumatra played a crucial role in demanding the central government to pay more attention to the regions. However, Barlian withdrew in the midst of its development, when it changed to insistence on the central government, until it become a PRRI rebellion. Under the leadership of Nawawi, PRRI South Sumatra rebellion extended until Bengkulu and MUBA. The purpose of this paper is to define how Barlian's attitude shifted to "neutral", and explain the PRRI rebellion process in South Sumatra. The methodology used was history, which consists of heuristic, data verification, interpretation, and writing. The results showed that Barlian's stance of choosing a peaceful path has resulted in his rejection of the form of violence taken by PRRI. PRRI in the South Sumatra region was part of the central PRRI rebellion under the leadership of Nawawi, with areas of struggle extending as far as Bengkulu and MUBA. The PRRI South Sumatra rebellion was difficult to be ceased by APRI, because it was based on guerrilla warfare. The rebellion ended along with the weakening and disappearance of PRRI, and other factors.

KEYWORDS

PRRI Rebellion, Neutral, PRRI South Sumatra

ABSTRAK

PRRI Sumsel adalah bagian dari PRRI pusat. Pada awalnya Barlian (Dewan Garuda) mempunyai peran penting bersama pemimpin lainnya di Sumatra, dalam menuntut pemerintah pusat agar lebih memperhatikan daerah. Namun, pada perkembangannya Barlian menarik diri, ketika berubah menjadi menuntut keras kepada pusat, hingga menjadi pemberontakan PRRI. PRRI Sumsel di bawah pimpinan Nawawi memberontak hingga Bengkulu dan MUBA. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perubahan sikap Barlian menjadi "netral", dan bagaimana proses pemberontakan PRRI di Sumsel. Metodenya adalah sejarah, yang terdiri heuristik, verifikasi data, interpretasi, dan penulisan. Hasilnya menunjukkan penolakan Barlian atas bentuk kekerasan yang diambil oleh PRRI, karena memilih jalan damai. PRRI di wilayah Sumsel merupakan bagian dari pemberontakan PRRI pusat di bawah pimpinan Nawawi, dengan wilayah perjuangan hingga Bengkulu dan MUBA. Pemberontakan PRRI Sumsel sulit diakhiri oleh APRI, karena berbasis perang gerilya. Pemberontakan berakhir seiring dengan lemah dan lenyapnya PRRI, dan faktor lainnya.

KATA KUNCI

Pemberontakan PRRI, Netral, PRRI Sumsel

PENDAHULUAN

Memasuki tahun 1950 pasca-berakhirnya perang mempertahankan kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem ketatanegaraannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan harapan, justru menimbulkan masalah baru dalam sistem perpolitikan Indonesia (Sartono, 2009). Sistem Kabinet Parlementer, dan polarisasi partai politik menyebabkan pemerintahan Indonesia mengalami ketidakstabilan (Kaban, 2000). Hal tersebut dibuktikan dengan jatuh-bangunnya kabinet pemerintahan dalam waktu singkat selama periode 1950-1959 (Irawan, 2006).

Pemerintah pusat kurang mengakomodir kepentingan rakyat, khususnya di daerah-daerah. Hal itu disebabkan, daerah merasa pemerintah pusat kurang memperhatikan daerah, sehingga menimbulkan kekecewaan yang mendalam sehingga berujung pada keinginan untuk memberontak lepas dari pemerintah. Orang-orang Sumsel menyalahkan pemerintah yang mereka nilai terlalu berpihak kepada orang-orang Jawa, sehingga mereka mendapat porsi lebih baik bidang militer maupun sipil. Tindakan tersebut dinilai mengecilkan peranan penduduk asli yang akan berbuat untuk daerahnya sendiri. Apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut menimbulkan perasaan tidak senang, karena pemerintah di Jakarta yang dianggap menjadi “dalang” dari semua itu. Akibatnya rakyat lebih memilih perjuangan melawan pusat yang dimotori oleh tokoh-tokoh Sumatra (Candra, 2015: 86-88; Apipudin, 2016). Ini artinya pemberontakan di Sumatra sudah mendapat dukungan dari masyarakat pada umumnya.

Pergolakan daerah yang pada mulanya hanya terjadi di Sumatra, menjalar ke Pulau Sulawesi. Konstelasi politik yang tidak stabil, masalah ekonomi dan polarisasi partai melahirkan disintegrasi bagi bangsa ini (Maulida, 2018). Kondisi tersebut didukung pula oleh daerah-daerah luar Jawa yang umumnya otonom, secara fungsional dikendalikan oleh perwira militer setempat (Doepers, 1972). Kelompok militer ini melihat belum ada perubahan yang signifikan sejak Republik Indonesia berdiri, padahal peran mereka dalam merebut, dan mempertahankan kemerdekaan sangat besar. Untuk itu, mereka menyuarakan agar kondisi yang ada menjadi lebih baik. Sayangnya, apa yang mereka suarakan belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Atas dasar inilah, kelompok militer didukung oleh kelompok sipil, dan rakyat mendirikan organisasi yang dinamai Dewan Daerah. Dewan Daerah terdiri dari Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda di Sumatra Selatan (Sumsel).

Tindak lanjut dari pendirian Dewan Daerah, di Palembang diadakan “Kongres Adat Sumatra Selatan” pada 1957. Acara ini dihadiri oleh berbagai lapisan dan golongan masyarakat baik sipil maupun militer. Kongres ini menghasilkan “Piagam Perjuangan Rakyat Sumatra Selatan”, yang menuntut penyelesaian tiga masalah pokok yaitu ekonomi, pembangunan, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. (Djarab, 2004). Selain itu, dibentuk pula Dewan Garuda¹ (17 Januari 1957) di bawah pimpinan Letnan Kolonel

¹ Posisi Wakil Kepala Staf dipegang oleh Mayor Nawawi, Asisten I nya Mayor Alamsyah Ratuprawiranegara, Asisten II dikendalikan oleh Mayor Hariman, Asisten III dipegang oleh Mayor Asnawi Mangkualam, dan Asisten IV di tangan Mayor Yusuf Singadikane (Leirissa, 1991: 72). Munculnya dewan ini menandai makin solidnya

(Letkol) Barlian selaku Panglima Tentara dan Teritorium (TT) II/Sriwijaya. (Leirissa, 1992, p. 72). Selanjutnya, langkah yang diambil oleh Letkol Barlian adalah mengambil alih pemerintahan daerah dari Gubernur Winarno pada 9 Maret 1957² (sebelumnya telah terjadi pengambilalihan atas pemerintahan Sumatra Tengah oleh Dewan Banteng 20 Desember 1956, dan Dewan Gajah pada 22 Desember 1956). Letkol Barlian dan stafnya juga melakukan konsolidasi dalam rangka untuk mengakomodir aspirasi rakyat Sumsel khususnya di bidang pembangunan daerah (Chandra, 2016; (Kahin, 2005). Tindakan pengambilalihan kekuasaan tersebut merupakan awal terjadinya perlawanan (Haluan, 1957: 1; Suryohadiprojo, 1996: 160; Subdirektorat Sejarah, 1992: 63).

Pergolakan-pergolakan di berbagai daerah semakin masif terjadi, disebabkan pemerintah pusat kurang mengindahkan tuntutan daerah. Para pemimpin daerah bergolak (Dewan Daerah) kemudian bertemu di Palembang dan menghasilkan sebuah deklarasi yang diberi nama “Piagam Palembang”, sebagai landasan perjuangan bersama. (Leirissa, 1992, hlm. 72). Selanjutnya, para perwira militer berkumpul kembali di Sungai Dareh (Sumatra Tengah) untuk mengukuhkan perjuangan daerah bergolak dalam upaya menekan pemerintah pusat. Akhirnya, pada 10 Februari 1958, Dewan Daerah mengultimatum pemerintah pusat agar dalam jangka waktu 5x24 jam harus segera merealisasikan tuntutan mereka. Pemerintah pusat kemudian merespon ultimatum tersebut dengan cara yang bertolak belakang dengan tuntutan tokoh-tokoh daerah (militer dan sipil), yaitu memecat beberapa tokoh-tokoh militer daerah, dan mengeluarkan perintah penangkapan (Kahin & Kahin, 1997). Pada 15 Februari 1958, setelah berakhirnya waktu ultimatum yang ditolak, Dewan Daerah mengumumkan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Pengumuman PRRI menimbulkan polemik di dalam tubuh Dewan Daerah, sebagian tokoh-tokoh menolak rencana konfrontasi dengan pemerintah pusat. Salah satu tokoh yang adalah Letkol Barlian mewakili Dewan Garuda. Menurutnya masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai. Untuk itu, ia menyatakan bahwa Sumsel tidak diperuntukkan untuk menjadi landasan operasi kekerasan bagi kedua belah pihak (Djarab, 2004). Walaupun sikap netral Barlian merepresentasikan kehendak masyarakat Sumsel, ternyata terdapat beberapa tokoh militer Sumsel yang menyetujui pembentukan PRRI. Tokoh

para tokoh di Sumatra menuntut pemerintah mengambil langkah “damai” dengan mengadakan Konferensi Panglima se Sumatra di Palembang pada 29 – 31 Januari 1957. Sayangnya upaya itu kurang berhasil. (Dewi, 2008: 106; Chandra, 2016: 42).

² Konflik antara sipil dan militer di bawah pimpinan letkol Barlian sudah terlihat ketika tengah berlangsungnya Konferensi Gabungan Pamongpraja Sumsel pada 18-19 Desember 1956, yang dihadiri oleh para Residen, Bupati, Walikota, Anggota DPD, dan Kepala Dinas Otonom. Konferensi itu membahas Pembangunan Lima Tahun Daerah Sumsel yang dipimpin langsung oleh Gubernur Winarno. Jalannya konferensi itu tidak memuaskan sebagian dari tokoh-tokoh yang hadir, karena melihat dan merasakan lambannya pembangunan di daerah ini. Akibatnya mereka bergabung dengan “Badan Penyalur Kehendak Masyarakat Sumatra Selatan” (BPKM-SS). Lembaga inilah yang nantinya menjadi basis kelompok Letkol. Barlian yang melakukan kontrol politis terhadap Gubernur Winarno ((Panggabean, 1993, pp. 237–238); Hanafiah, 1996: 285). Kontrol itu diwujudkan dalam bentuk rapat BPKM-SS pada 27 Desember 1956, dengan resolusi tentang kekecewaan atas lambannya pembangunan di daerah ini. Atas dasar resolusi inilah Letkol Barlian selaku Panglima penguasa perang TT II/Sriwijaya, menyatakan “keadaan bahaya”. Pernyataan inilah yang menjadi dasar memaksa Gubernur Winarno untuk melepaskan jabatannya, digantikan oleh Residen M. Husein (Santun, 2011: 151-152; Hanafiah, 1996: 285; Panggabean, (Panggabean, 1993)).

tersebut ialah Mayor Nawawi Mayor Nawawi yang memihak PRRI memilih mundur dari Palembang ke perbatasan Bengkulu untuk membangun kekuatan PRRI disana.

Membahas pemberontakan adalah upaya yang dilakukan oleh perorangan atau banyak orang untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah (Sugono, 2008, hlm. 188). Pemberontakan biasanya dilancarkan dengan kekerasan fisik, baik melalui peperangan maupun pembangkangan sipil (*civil disobedience*). Pemberontakan umumnya dilatarbelakangi oleh rasa tidak puas masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ketidakpuasan tersebut dimobilisasi oleh tokoh-tokoh, untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Proses mobilisasi ini sangat ampuh dalam melemahkan legitimasi pemerintah. Mereka menginginkan terjadinya perubahan radikal di dalam struktur pemerintahan dan perubahan kebijakan nasional.

Sejarah pemberontakan dapat dirunut paling tidak dari peristiwa penting yaitu Revolusi Prancis, yang dimulai dengan pemberontakan rakyat dan bangsawan yang berhasil menggulingkan pemerintahan absolut raja Louis XVI. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah akibat ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik yang melanda Prancis pada saat itu. Peristiwa Revolusi Prancis menjadi begitu penting bagi dunia, karena menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain untuk menciptakan pemberontakan serupa dalam rangka membebaskan diri dari tirani. Contoh lain adalah Revolusi Amerika, Revolusi Rusia, Revolusi Cina, *Fuerzas Armades Revolucionarias de Colombia* (FARC) di Kolombia, *Caucasian Front di Czech*, *Sect of Revolutionaries* di Yunani, *Black Angle* di Kolombia, M23 di Kongo, *Populer Front For Recovery* (FPR) di Afrika Tengah, dan lainnya. Di Indonesia juga beberapa kali terjadi pemberontakan, diantaranya adalah pemberontakan Petani Banten terhadap kolonial Belanda tahun 1888. Selain itu, terdapat pula beberapa pemberontakan lain seperti Pemberontakan PKI 1926, Pemberontakan PKI Madiun/1948, pemberontakan DI/TII, Pemberontakan Republik Maluku Selatan, Pemberontakan APRA, Pemberontakan G30S/PKI 1965, dan lainnya (Kartodirdjo, 1984; Almas, 2016. republika.co.id; Ade S, 2019. nationalgeographic.grid.id; Isnaeni, 2016. Historia.id).

Berbagai pemberontakan di atas, sebagian besar memiliki latar belakang, motif, dan tujuan yang sama seperti Pemberontakan PRRI, yaitu diawali dengan ketidakpuasan masyarakat atas hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang memicu perebutan status *quo* dari otoritas sah. Oleh karena itu, penting dilihat bahwa aksi pemberontakan merupakan suatu produk politik yang tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur sosial-masyarakat. Pemberontakan muncul secara organik di dalam masyarakat sehingga kunci untuk menghindari aksi pemberontakan tidak lain ialah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Oleh sebab itu, maka pemberontakan PRRI di Sumsel yang merupakan bagian dari PRRI yang terjadi di Sumatra pada umumnya menarik untuk dikaji. Adapun masalahnya adalah “mengapa Dewan Banteng menarik diri sebagai bagian dari pemberontakan PRRI di Sumatra Selatan, dan bagaimana jalannya pemberontakan tersebut 1956-1961”. Tujuannya adalah untuk menjelaskan mengapa Dewan Banteng menarik diri dari pemberontakan PRRI

Sumatra selatan. Selain itu, untuk merekonstruksikan kembali peristiwa bersejarah berupa pemberontakan PRRI di Sumsel Tahun 1956-1961.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian historis. Metode penelitian ini mengacu pada tahapan-tahapan, yaitu heuristik yang terdiri dari mengumpulkan sumber-sumber, diikuti dengan melakukan kritik sumber, interpretasi sumber dan rekonstruksi. Tahap heuristik adalah tahap awal berupa penelusuran dan mengumpulkan data, yang merupakan sumber terpenting dalam penelitian sejarah. Sumber-sumber yang dikumpulkan berupa arsip, koran, kajian kepustakaan dan wawancara. Data yang telah terkumpul dilakukan kritik, baik intern (isinya), maupun ekstern (kondisi data/sumber). Tahap berikutnya adalah melakukan interpretasi (analisis dan sistesis) atas semua sumber yang telah dikritik. Tahap akhir adalah menuliskannya secara hati-hati agar mampu menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Kuntowijoyo, 2013).

Penulisan ini juga menggunakan batasan spasial yaitu wilayah Sumsel khususnya yang menjadi arena pemberontakan PRRI di daerah ini yaitu di kota Palembang, Bengkulu, dan Musi Banyuasin. Untuk batasan temporal digunakan tahun 1958 sampai tahun 1961. Pengambilan tahun ini didasari oleh permulaan terjadinya pemberontakan hingga berhasil ditumpas tahun 1961.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penolakan Dewan Garuda terlibat dalam Pemberontakan PRRI (Perbedaan Pandangan)

Penolakan daerah-daerah atas pemerintah pusat, tentunya didasari kekecewaan atas belum tampaknya perubahan khususnya di bidang ekonomi. Di sisi lain, kondisi politik juga tidak stabil, persaingan antar-partai serta sentimen pada ras tertentu membawa bangsa yang baru merdeka dan lepas dari upaya mempertahankan kemerdekaan, menjadi semakin tidak stabil. Terjadilah kabinet jatuh-bangun (Irawan, 2006; Kaban, 2000).

Wujud kekecewaan demi kekecewaan yang daerah-daerah rasakan, mendorong mereka mendirikan organisasi berbentuk Dewan-Dewan Daerah di Sumatra, yaitu Dewan Garuda, Dewan banteng dan Dewan Gajah. Dalam perjalanannya, dewan-dewan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerak perlawanan daerah khususnya di Sumatra. Setelah melahirkan "Piagam Palembang" yang memuat tentang pentingnya diadakan desentralisasi, dan melarang Komunisme. Sayangnya tuntutan tersebut belum juga diakomodir oleh pemerintah, sehingga memunculkan kesepakatan untuk meningkatkan pengambilalihan sumber-sumber ekonomi yang banyak terdapat di daerah mereka, yang selama ini dikendalikan oleh pusat. Selain itu, para tokoh-tokoh tersebut juga membina hubungan yang semakin meningkat dengan Amerika Serikat, Singapura, Tokyo, Taiwan dan Hongkong ((Kahin, 2005): 323; (Djarab, 2004): Pambudi

dkk, 2011:158; Chandra: 2015: 91-92; Sinolungan, 2016: 86-87; Subdirektorat Sejarah, 1987: 215; (Leirissa, 1992, hlm. 72)).

Sementara itu, pemerintah pusat menanggapi hal tersebut dengan cara melakukan serangan militer yang dahsyat perlawanan Sumatra ini. Mereka juga mengambil para dedengkot perlawanan dari militer dan sipil (Ricklefs, 2007: 397). Penumpasan terhadap para tokoh pemberontak itu mengerahkan semua kesatuan, dengan operasi militer bernama Operasi Sadar (Sumsel), Operasi Tegas (Riau), dan Operasi 17 Agustus (Padang). Semuanya bertugas untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai PRRI di Sumatra. (Kahin & Kahin, 1997).

Pemberontakan yang tengah berkecamuk di Sumatra Barat, Tengah dan Riau tidak membuat Sumsel juga terlibat. Hal itu disebabkan telah terjadinya perbedaan sudut pandang dalam melihat jalannya perjuangan. Letkol Barlian sebagai kepala Dewan Garuda menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah pusat dan daerah. Itulah sebabnya, ia menyatakan menarik diri dari konflik tersebut dan berada di luar arena. Sikap tersebut mendapat dukungan dari Badan Koordinasi Organisasi-Organisasi Perantau Sumatra Tengah (BKOPST). Kelompok ini meminta agar Panglima TT II/Sriwijaya menjadi penengah dan meredam konfrontasi antara gerakan PRRI dan pemerintah pusat (Suara Rakyat Sumatra, 17 Februari 1958; ANRI (2012), Bundel Konstituante 1956-1960 No. 199 dan No. 121;). Atas dasar itulah, maka Letkol. Barlian mengambil langkah dengan membuat rencana guna mempertemukan Kepala Staf AD (KSAD) A.H. Nasution dan panglima-panglima daerah di Pulau Bangka (Desember/Januari 1958), namun usaha itu gagal. Langkah lain adalah menjadi inisiator pertemuan di Sungai Dareh yang menghasilkan ultimatum, sekaligus menjadi saksi makin melebarnya perbedaan pola perjuangan³ antara Letkol Barlian dan tokoh-tokoh PRRI. (Kahin-Kahin, (1997, hlm. 161-162); (2005, hlm. 319-320)).

Seiring dengan makin jauhnya gerakan dari dewan-dewan daerah, Letkol Barlian semakin teguh pendiriannya bahwa penyelesaian damai adalah jalan yang terbaik. Akibatnya ada kecenderungan Dewan Garuda melepaskan diri dari Dewan Perjuangan⁴. Pendekatan tokoh-tokoh, diantaranya Sjafruddin Prawiranegara dan tokoh-tokoh dari Sumatra Barat tidak mampu meluluhkan hati Letkol Barlian untuk keluar dari Dewan Perjuangan. (Rosidi, 2011, hlm. 328-329).

³ Kelompok militer menyatakan siap berperang dengan pusat. Selain itu, terdapat dua kubu yang berlawanan, antara yang menginginkan perundingan yaitu Natsir, Syafruddin P, dan Barlian. Kelompok lainnya menuntut pemerintahan tandingan, yang dimotori oleh Simbolon, Soemitro dan Ahmad Husein. (Djarab, 2004: 286; Kahin dan Kahin, 1997: 163). Setelah melakukan perundingan alot kedua kubu sepakat melahirkan keputusan berupa "menyetujui pendirian pemerintahan tandingan, sebagai posisi daya tawar (gertakan) terhadap pemerintah pusat agar tuntutan daerah disetujui". (Chandra, 2015: 102-103). Sebagai penggagas pertemuan di atas, Letkol Barlian menolak tegas pembentukan pemerintahan tandingan, yang menurutnya justru akan menimbulkan perang saudara yang sangat merugikan semua pihak. (Kahin dan Kahin, 1997: 164-165; Djarab, 2004: 287)

⁴ Penolakan Barlian berdasarkan perhitungan yang matang, diantaranya adalah posisinya sebagai Panglima TT/II Sriwijaya masih lemah yang disebabkan berbagai faktor seperti loyalitas bawahan, etnisitas, kuatnya posisi AURI yang berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat, sedangkan mereka pemegang kendali lapangan udara Talang Betutu, dan lainnya. Namun, meskipun demikian tetap ada yang memberikan dukungan yaitu Komandan Batalyon Palembang (Mayor Nawawi). (Kahin dan Kahin, 1997: 166-167)

Ketika diumumkannya ultimatum Dewan Perjuangan, maka reaksi dari para pemimpin Sumsel (militer dan sipil) ditandai dengan dikeluarkannya pernyataan melalui RRI Palembang oleh Perwira Pers TT II/Sriwijaya Lts. Marah Nazaruddin. Isinya menyatakan bahwa pimpinan TT II/Sriwijaya sedang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tercapainya perdamaian melalui musyawarah. Untuk itu, maka Letkol Barlian mengirim delegasi ke Jakarta guna menghadap Presiden Soekarno, Perdana Menteri Djuanda, dan KSAD A.H Nasution (Suara Rakjat Sumatra, 13 Februari 1958: 1). Walaupun upaya itu gagal, namun tetap menunjukkan besarnya usaha untuk mengembalikan kondisi seperti sebelumnya. Upaya itu mendapat dukungan dari semua golongan di Sumsel. Selain itu, juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga ketertiban, dan persatuan. (Suara Rakjat Sumatra, 14 Februari 1958: 1).

Sementara itu, pemerintah pusat menjalankan misinya dengan cara melakukan pendekatan kepada Letkol Barlian. Langkah yang ditempuh adalah mengirim utusan yang terdiri dari tokoh-tokoh Sumsel yaitu kepala Staf Harun Sohar, dan Kol. Ibnu Sutowo yang menduduki posisi sebagai Deputy II KSAD pada 14 Februari 1958 ke Palembang guna membujuk Letkol Barlian agar tidak bergabung dengan gerakan yang berpusat di Sumatra Barat, sekaligus tetap berada di bawah naungan Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Sebab dengan tidak terlibatnya Sumsel, maka akan melemahkan posisi Dewan Perjuangan secara politis dan militer. Tawaran tersebut diterima oleh Letkol Barlian dengan syarat pemerintah harus memenuhi keinginan masyarakat dan tokoh-tokoh daerah (Hanafiah, 1996: 288-289).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kehadiran Ibnu Sutowo untuk “membersihkan” Sumsel dari anasir-anasir pendukung PRRI, dan hasilnya justru Letkol Barlian diberhentikan dari posisinya sebagai orang tertinggi di wilayah TT II/Sriwijaya. Meskipun demikian, Letkol Barlian tetap pada pendiriannya untuk tidak memihak pada salah satu golongan. Buktinya bulan September 1958 penguasa militer ini membuat keputusan agar rakyat dan militer tetap tenang, dan solid di bawah satu komando. Semua itu demi tercapai cita-cita yang telah dicanangkan tanpa mengorbankan keselamatan negara (Suara Rakjat Sumatra, 17 Februari 1958: 1).

Pemberontakan PRRI Sumatra Selatan

Pecahnya pemberontakan di Sumatra Tengah, disikapi oleh penguasa militer Sumsel dengan bersikap netral, ditandai dengan dikeluarkannya “Pernyataan Kebulatan Rakyat Sumsel” yang berisi tentang keteguhannya memperjuangkan tuntutan daerah melalui jalur kompromi yang senantiasa berpegang pada Proklamasi 17 Agustus 1945. (Suara Rakjat Sumatra, 17 Februari 1958: 1). Seruan sikap netral Barlian tersebut disambut penolakan oleh sebagian tokoh militer di TT II/Sriwijaya di bawah pimpinan Mayor Nawawi. (Fauziah, Yusuf dan Alian, 2020). Mayor Nawawi menjadi tokoh utama dalam pemberontakan PRRI di wilayah Sumsel. Kondisi tersebut menyebabkan Ibnu Sutowo selaku pemimpin Operasi Sadar harus menghadapkan Mayor Nawawi ke hadapan KSAD Nasution, namun gagal sehingga Mayor Nawawi diberhentikan

sementara⁵. Pemberhentian tersebut merupakan salah satu bagian penting dari munculnya PRRI di Sumsel (Suara Rakjat Sumatra, 2 Mei 1958; Suara Rakjat Sumatra, 3 Mei 1958; Suara Rakjat Sumatra, 28 April 1956:).

Menyadari kondisi yang ada, maka ia mengambil langkah mundur ke Sungai Gerong yang merupakan pusat pengilangan minyak Stanvac di luar kota Palembang, dengan membawa satu yon pasukan beserta persenjataan, kendaraan, dan peralatan komunikasi. Di sana ia mengumumkan mendukung gerakan PRRI di Padang dan berencana akan membangun pangkalan militer. (Kahin & Kahin, 1997). Akibatnya Ibnu Sutowo dan pasukannya menggempur Sungai Gerong, dengan bantuan pesawat tempur AURI dan pasukan KKO AL22. Pertempuran hebat terjadi yang menyebabkan Nawawi bersama pasukan harus menarik diri hingga Bengkulu. (Chandra, 2015). Di lokasi terakhir ini Nawawi berhasil membangun kekuatan⁶, juga membuat PRRI di wilayah MUBA berkat kedekatan hubungannya dengan M. Qorik Ujud⁷ yang merupakan tokoh militer terkemuka di sana. (Haris, 2010).

Sepanjang tahun 1958-1959, Nawawi, M. Qorik, dan Zakaria Kamidjan fokus membangun kekuatan tempur PRRI, dan merekrut banyak sukarelawan untuk mendukung perjuangan mereka. Orang-orang baru tersebut umumnya berasal dari masyarakat sipil, maka diadakan pelatihan militer sekitar satu tahun (akhir tahun 1959). Pasukan yang sudah terlatih itu, disiapkan untuk bertugas sektor-sektor tempur diberbagai daerah. Operasi militer yang dijalankan adalah melakukan patroli, menyerang asrama militer, dan markas tentara pemerintah pusat. Strategi yang dijalankan adalah perang gerilya, yaitu menyergap dan lari memasuki hutan (mereka menguasai hutan-hutan di MUBA dan Bengkulu). Pola tersebut menyulitkan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI)⁸, untuk segera mengakhiri pemberontakan yang terus berlangsung hingga tahun 1960. APRI hanya mampu menduduki pusat-pusat keramaian masyarakat

⁵ Pemberhentian itu diikuti menciduk perwira-perwira militer. Peristiwa itu membuat situasi makin tegang. Dua tokoh yang condong kepada pemerintah menuntut Barlian agar tunduk kepada pimpinan militer di Jakarta, dan memberantas pemberontak. Di mata mereka Barlian sama sekali tidak berupaya secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah politik di daerah ini. Dalam kondisi demikian, Barlian mengajukan "istirahat" dengan alasan kesehatan. Namun, justru kondisi itu dimanfaatkan oleh Ibnu Sutowo untuk memberhentikan Barlian sebagai panglima, dan segera menggantinya, dengan alasan demi kelancaran pemberantasan perlawanan di sini. (Suara Rakjat Sumatra, 30 April 1958; Mahjumah, 1972: 283-286). Tindakan berikutnya diambil oleh Ibnu Soetowo adalah melakukan pengejaran terhadap pasukan Nawawi, sehingga Nawawi dengan pasukan harus keluar dari Palembang (Chandra, 2015: 111).

⁶ Kekuatan pemberontakan di Sumsel mencapai ribuan, dengan dibagi lagi atas bagian-bagian atau sektor. Sektor terkuat I, II, III di MUBA dengan kekuatan milisi sebanyak ratusan orang, lengkap dengan persenjataannya. (Wawancara dengan Bapak Harom Basri, 29 Maret 2020).

⁷ M. Qorik mendapat dukungan dari tokoh-tokoh ulama, militer dan elit lokal, yaitu Agustjik (Karang Anyar), Basri Buyung (Keluang), Rainsun dan Akun (Rantau Panjang), Makmun (Lumpatan), Keria Hakim (Muara Teladan), Kofli, K.H Amer Hamzah, Wahid, Malik H. Deris dan kawan-kawannya dari golongan militer, serta dari golongan pemuda. Akibatnya anggota pasukan M. Qorik dengan cepat berkembang. (Haris, 2010: 183-184).

⁸ Sejak September 1958, TT II/Sriwijaya telah mengirimkan beberapa batalyon tempur ke lokasi-lokasi yang dikuasai oleh PRRI khususnya di daerah MUBA, Bengkulu, dan Jambi. Sebelumnya pasukan pemerintah pusat (APRI) telah merazia militer, sebab dicurigai ada militer yang berpihak kepada golongan pemberontak. Dalam pengeledahan tersebut mereka menangkap beberapa tokoh, diantaranya Ov. Effendy, Lts. Marah Nazaroeddin, dan lainnya. Semuanya dibawa ke Jakarta untuk dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, mereka juga menemukan persenjataan, beberapa granat yang diduga untuk PRRI, dan menyita kantor media yang pro pada gerakan PRRI. (Suara Rakjat Sumatra, 3 Mei 1958; Suara Rakjat Sumatra, 2 Mei 1958)

seperti dusun, kampung, desa, atau kota. Sedangkan pasukan PRRI bermarkas di hutan-hutan lebat yang mampu melindungi mereka dengan baik. Kontak senjata hanya dapat dilakukan ketika pasukan APRI lengah, mereka menghindari perang secara terbuka karena lemahnya kekuatan yang mereka miliki, dibandingkan dengan pasukan APRI.

Kekuatan terbesar yang dimiliki oleh PRRI Sumsel adalah MUBA, sehingga dijadikan basis perlawanan. Itulah sebabnya TT II/Sriwijaya memfokuskan serangan di wilayah itu, dan menjadikannya Daerah Operasi Militer (DOM). Perubahan status tersebut berdampak bagi kehidupan masyarakat setempat, mereka sering kali menjadi korban salah sasaran atau salah tuduh. Bahkan seringkali mereka menjadi kambing hitam, baik dari pihak APRI maupun PRRI. Penduduk sering kali dituduh sebagai kaki tangan PRRI atau APRI. Akibatnya masyarakat kesulitan bergerak, dan mencari nafkah yang umumnya bekerja menggarap karet, berkebun sayuran dan bersawah. Apalagi setelah APRI mengeluarkan larangan bagi penduduk pergi ke kebun, sebab mereka sering kali memberikan bantuan makanan kepada pasukan PRRI. Jika larangan tersebut diabaikan, maka kebun-kebun mereka dibakar, sebagaimana yang terjadi di Lubuk Keduduk, Talang Sungai Mandi, Piase, Sungai Tempale. Selain itu, pasukan APRI juga melakukan pengeledahan terhadap rumah-rumah warga yang salah satu anggota keluarganya ikut gerakan PRRI akan diberi tanda G atau X9. Selain memberikan tanda, anggota APRI juga membongkar atap-atap rumah pemimpin-pemimpinnya. Bahkan terjadi perang terbuka di sana, sehingga anggota militer pemerintah membunuh seluruh Dusun Tanjung Durian. Dengan demikian, perang itu mendatangkan banyak kerugian bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, mereka menuntut agar perang segera diakhiri (Haris, 2010).

Sayangnya bukan berdamai, malah kembali terjadi perang terbuka dari kedua belah pihak. Pasukan PRRI terus menyerang pos-pos APRI dan menghadang patroli keamanan. Sedangkan APRI menyelusuri hutan-hutan MUBA, dan Bengkulu untuk mencari markas PRRI, dan memburu anggota pasukannya. Lokasi-lokasi kontak senjata secara langsung terjadi di sekitar MUBA, yaitu di Dusun Danau Cala, Sungai Pinang Rantau Panjang, Padang Windu, Talang Piase, Talang Sungai Mandi, Teluk Kijing, Sungai Angit, Talang Sungai Sangkut, Lubuk Pandan, Pengabuan, Keban, dan lainnya (Haris, 2010). Banyak anggota PRRI dan APRI yang gugur, mereka saling merampas persenjataan, juga membuat pernyataan bahwa salah satu pihak telah berhasil mengalahkan lawan. Sepanjang tahun 1960 pasukan PRRI Sumsel berhasil mengungguli pertempuran gerilya dan penyergapan, sedangkan untuk pasukan APRI mengungguli pertempuran frontal (Wawancara Dengan Basri, 29 Maret 2020).

Seiring dengan berjalannya waktu, ditengah masa gemilang dari pasukan PRRI Sumsel, malah terjadi perselisihan antar-elite yaitu antara Nawawi dan Zakaria Kamidjan dalam memperebutkan posisi pimpinan PRRI Sumsel. Zakaria yang merasa setara dengan Nawawi, hendak menjadi pemimpin PRRI dan menggeser Nawawi. Nyaris terjadi bentrokan antara pasukan Zakaria dan Nawawi. Zakaria mendapat dukungan dari

⁹ Tanda tersebut merupakan kesepakatan dari para pemimpin PRRI untuk memudahkan dalam menjalankan misinya. (Haris, 2010)

Bengkulu, ditambah pasukannya sendiri yang mencapai jumlah ratusan orang. Sedangkan pasukan Nawawi berjumlah lebih besar dari pasukan Zakaria, ditambah pasukan dari Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Selanjutnya, Zakaria mengambil alih kekuasaan dari Nawawi, dan mengeluarkan maklumat bahwa semua pasukan Nawawi harus ditangkap. Bahkan Zakaria membuat pernyataan bahwa ia adalah pemimpin tertinggi di Sumsel. Selanjutnya, ia mengirim milisinya untuk membersihkan milisi-milisi yang berpihak pada musuhnya. Otomatis ini menyebabkan terjadinya peperangan anta-kedua kubu di Bengkulu. Dalam pertempuran itu Letnan Mustofa terbunuh, yang berarti merupakan kerugian besar bagi pihak Panglima Nawawi. Zakaria pun lalu mengangkat dirinya sebagai Komandan Sub Teritorial Bengkulu dengan Salamun sebagai wakilnya (Batanghari Sembilan, 7 Desember 1960: 1). Peristiwa di atas memaksa Nawawi meninggalkan Bengkulu menuju MUBA untuk mendapatkan perlindungan dari M. Qorik. Konflik internal itu terus melanda PRRI hingga penghujung tahun 1960. Akibatnya, pelan tapi pasti kekuatan PRRI Sumsel mulai melemah dan memunculkan opini untuk mengakhiri perjuangan ditengah-tengah anggota PRRI.

Pemberontakan PRRI Sumsel Berakhir

Tahun 1961 merupakan masa mundurnya perlawanan PRRI, baik di pusat maupun Sumsel, setelah dihadapkan pada berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Di dalam tubuh PRRI pusat terjadi perbedaan pandangan yang tajam, sejak dicanangkannya rencana pendirian konstitusi Republik Persatuan Indonesia (RPI). Kalangan militer mulai bergerak sendiri tanpa menghiraukan kelompok sipil PRRI. Sementara itu PRRI Sumsel juga dihadapkan pada masalah yang tak kalah beratnya yaitu upaya kudeta yang dilancarkan oleh Zakaria terhadap Nawawi, membuat kondisi menjadi kacau, sehingga Nawawi harus mundur ke MUBA dan itu menurunkan moril anggota PRRI Sumsel. Di sisi lain, pasukan pemerintah pusat makin meningkatkan agresivitas operasi militer untuk menumpas pemberontakan PRRI. Hasilnya APRI sukses merebut markas pusat PRRI di Koto Tinggi, dan merampas semua persenjataan beserta peralatan komunikasi di sana. Faktor terpenting melemahnya moril perjuangan pasukan PRRI adalah tawaran damai dari pemerintah, sehingga PRRI kehilangan sekitar 75 persen dari seluruh anggota pasukannya. Tampaknya mereka telah lelah menjalankan peperangan yang berkepanjangan, dengan amunisi seadakan karena makin berkurang. (Kahin & Kahin, 1997, hlm. 277). Sementara itu, PPRRI Sumsel selain dihadapkan dengan konflik internal, dengan krisis logistik dan ransum. Di sisi lain, APRI semakin agresif melancarkan gempurannya, sehingga posisi PRRI Sumsel semakin terjepit. Dalam kondisi demikian, dan melihat kondisi PRRI Pusat yang telah hancur, maka para pemimpin PRRI Sumsel memutuskan untuk menyudahi perjuangan, dan mulai menyusun rencana perdamaian (Wawancara dengan harom Basri, 30 Maret 2020, dan wawancara dengan Fuad, 28 Maret 2020).

Tindaklanjutnya adalah mulai memasuki pertengahan 1961, para tokoh pemebrontakan di Sumatra Tengah dan Sumsel menyatakan berhenti berperang. (Kahin, 2005, hlm. 354–355). PRRI Sumsel perdamaian didahului dengan perundingan-perundingan. Pihak APRI dari TT II/Sriwijaya diwakili oleh Abdul Kohar Huduyo,

pemerintah pusat diwakili oleh Kolonel Sabirin. Sedangkan PRRI diwakili oleh M. Qorik dengan perantara K.H. Rasyid Siddik yang merupakan sahabat M. Qorik. (Haris, 2010).

Akhir kesepakatan damai berhasil ditetapkan, dan A.H. Nasution selaku pimpinan tertinggi Angkatan Darat berjanji akan memberikan kompensasi berupa amnesti bagi seluruh anggota PRRI. Langkah pertama yang ditempuh adalah gencatan senjata, diikuti langkah berikutnya yaitu masing-masing pimpinan dari kedua belah pihak menginstruksikan kepada seluruh pasukannya untuk menahan diri, dan tinggal di markas masing-masing. Akhirnya pada Desember 1961 kesepakatan damai dapat diwujudkan di Desa Rantau Panjang. Negosiasi dilakukan di atas perahu di tengah sungai terbesar di Sumsel, dan dihadiri oleh perwakilan kedua belah pihak. Selebihnya berjaga di kedua sisi sungai. Tokoh-tokoh PRRI Sumsel diwakili oleh mediator Muhammad Zein. Sedangkan Nawawi dan M. Qorik sebagai pimpinannya. (Wawancara dengan Harom Basri, 29 Maret 2020). Tuntutan mereka diterima oleh pemerintah pusat, meliputi adanya pengampunan atas semua anggota PRRI Sumsel. Mereka juga mendapat ransum untuk masa enam bulan ke depan, sekaligus mendapat dana selama enam bulan sesuai posisinya, serta boleh kembali bertugas sebagai prajurit jika sebelum berasal dari APRI, sedangkan yang bukan dari militer diperkenankan memilih apakah menjadi militer dengan mengikuti latihan terlebih dahulu, atau tetap menjadi masyarakat sipil (Wawancara dengan Fuad, 28 Maret 2020).

Setelah perdamaian terwujud, maka para mantan PRRI mulai kembali ke kehidupannya masing-masing (militer atau sipil) untuk kembali hidup normal. Masyarakat menyambut dengan antusias perdamaian tersebut, dan kembali menata kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya tanpa dilanda rasa takut dan was-was. Untuk memperingati peristiwa istimewa itu, maka pada Januari 1962, diadakanlah acara perayaan perdamaian di Lapangan Sepakbola Sekayu yang dihadiri oleh seluruh masyarakat (Haris, 2010). Semua orang bersuka cita menyambut acara perdamaian itu, dengan menyembelih seekor kerbau bertanduk rungkup (tanduk yang memutar kebelakang yang menandakan bahwa kerbau tersebut tidak dapat lagi 'menanduk' untuk melukai lawannya) yang memiliki arti filosofis yaitu "perdamaian" antara mantan anggota PRRI dan APRI. Acara tersebut dihadiri KSAD A.H. Nasution, Panglima TT II/Sriwijaya Harun Sohar dan pejabat militer-sipil Sumsel lainnya. Setelah selesai, para mantan anggota PRRI diberikan tawaran bergabung ke dalam APRI. Mereka yang mau bergabung langsung diberangkatkan ke Desa Serong-MUBA untuk ditempa lebih lanjut menjadi prajurit militer APRI.

KESIMPULAN

Pemberontakan PRRI di Sumsel merupakan bagian dari PRRI yang berpusat di Sumatra barat. Pemberontakan tersebut merupakan peristiwa politik yang berawal dari ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terkait pembangunan, ekonomi, perimbangan keuangan, dan kesejahteraan sosial. Ketidakpuasan ini bertepatan dengan konflik internal militer Angkatan Darat antara komando pusat dan komando daerah. Selanjutnya, para tokoh militer daerah

mengkoordinir aspirasi ketidakpuasan tersebut, dan memimpin sebuah gerakan protes terhadap pemerintah pusat. Protes tersebut berkembang menjadi usaha pembangkangan, sebab pemerintah pusat tidak mengindahkan tuntutan daerah. Akhirnya pecah pemberontakan PRRI di Sumata.

Pada mulanya Dewan Garuda Sumsel berperan aktif dalam upaya menuntut keadilan kepada pemerintah pusat. Namun, setelah gerakan-gerakan yang ada berkembang mengarah kepada pembangkangan, maka Letkol Barlian selaku pemimpin tertinggi dari Dewan Garuda menolak bergabung. Itulah sebabnya pada perkembangan selanjutnya Dewan Garuda tidak ambil bagian dalam pemberontakan PRRI Sumsel. PRRI Sumsel muncul sebagai pernyataan menolak dominasi pusat dan melihat tidak adanya solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. PRRI Sumsel didirikan dan dipimpin oleh Nawawi. Dalam menjalankan misinya Nawawi mundur hingga Bengkulu, dan menyusun kekuatan di sana bersama-sama dengan Zakaria Kamidjan. PRRI juga berkembang di MUBA di bawah pimpinan M. Qorik.

Gerakan Nawawi baru bisa dihentikan setelah tiga tahun berkeliaran di hutan-hutan Muba dan Bengkulu. Nawawi mengakhiri pemberontakan PRRI Sumsel setelah para koleganya (PRRI Pusat) menyerahkan diri pada pemerintah pusat di sepanjang tahun 1961, juga karena konflik internal dan makin menipisnya logistik dan ransum. Selain itu, posisi mereka semakin terdesak dengan gencarnya gempuran dari pihak APRI. Perlawanan-perlawanan baru dapat diakhiri setelah dilakukan serangkaian perundingan yang berujung pada kesepakatan untuk mengakhiri peperangan dengan mengakomodir seluruh tuntutan PRRI Sumsel.

-Ucapan Terima kasih disampaikan kepada Bapak Drs. Supriyanto, M.Hum atas bimbingan beliau.-

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Chandra, R. (2015). *Kontestasi Politik di Palembang 1950-1970: Dinamika Politik Islam dari Liberal Sampai Transisi Menuju Orde Baru*. Yogyakarta: IDEA Press.
- Chandra, R. (2016). *KARET PALEMBANG* : 1, 21–45.
- Djarab, H. (2004). *Mendahului Semangat Zaman : Letkol Barlian (Panglima TT II Sriwijaya 1956-1958)*. Jakarta: Cikal Media.
- Doeppers, D. F. (1972). An Incident in the PRRI/Permesta Rebellion of 1958. *Indonesia*, 14(14), 182. <https://doi.org/10.2307/3350738>
- Fauziah, A., Yusuf, S., & Alian, A. (2020). Peranan Letnan I Nawawi Manaf Di Bengkulu Pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1945-1949. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 10(1), 67. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v10i1.4343>
- Haris, Y. (2010). *Pergolakan-Pergolakan Di Daerah Musi Banyuasin*. Palembang: Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Irawan, B. B. (2006). Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. *Perspektif*, 5(3), 54–64.
- Kaban, R. (2000). PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA. *Perspektif*, 5(3), 158–169.
- Kahin, A. R. (2005). *Dari pemberontakan ke integrasi Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998*. Yayasan Obor Indonesia.

- Kahin, A. R., & Kahin, G. T. (1997). *Subversi sebagai politik luar negeri: menyingkap keterlibatan CIA di Indonesia [Subversion as Foreign Policy, the Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia—1995]*, translated by RZ Leirissa (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti). Leirissa, RZ, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Pengantar Ilmu Sejarah.
- Leirissa, R. Z. (1992). *PRRI–PERMESTA: Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Maulida, F. H. (2018). Hitam Putih Prri-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956-1961. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 8(2), 174. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v8i2.180>
- Panggabean, M. (1993). *Berjuang dan mengabdikan*. Pustaka Sinar Harapan.
- Rosidi, A. (2011). *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Sartono, K. E. (2009). Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi. *Humanika*, 9(1), 93–106. <https://doi.org/10.21831/hum.v9i1.3786>
- Sugono. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Arsip dan Dokumen

ANRI. (2012). *Bundel Syafruddin Prawiranegara*.

Koran

Suara Rakyat Sumatra (Palembang, 1958)

Batanghari Sembilan (Palembang, 1960)

Wawancara

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Taggal Wawancara	Keterangan
1	Fuad	Laki-laki	77 Tahun	28 Maret 2020	Mantan Ajudan M Qorik.
2	Harom Basri	Laki-laki	78 Tahun	29 Maret 2020	Mantan Ajudan M. Qorik